



## BUPATI SUMENEP

### SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 11 Desember 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenep.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 03 Januari 2024



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

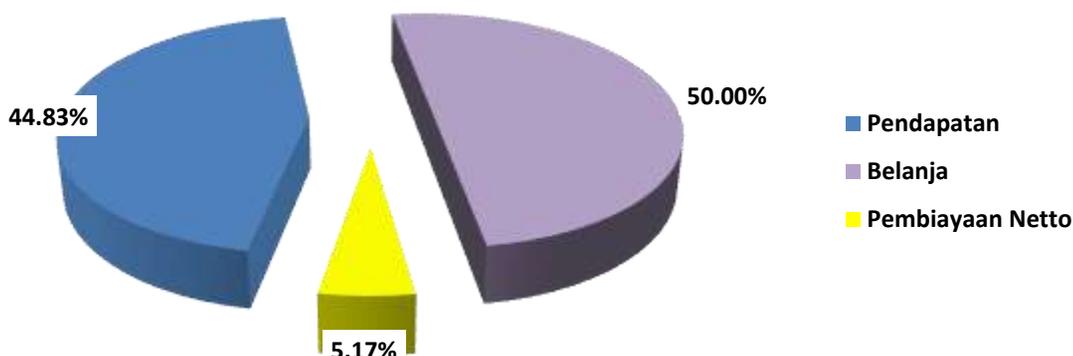
## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

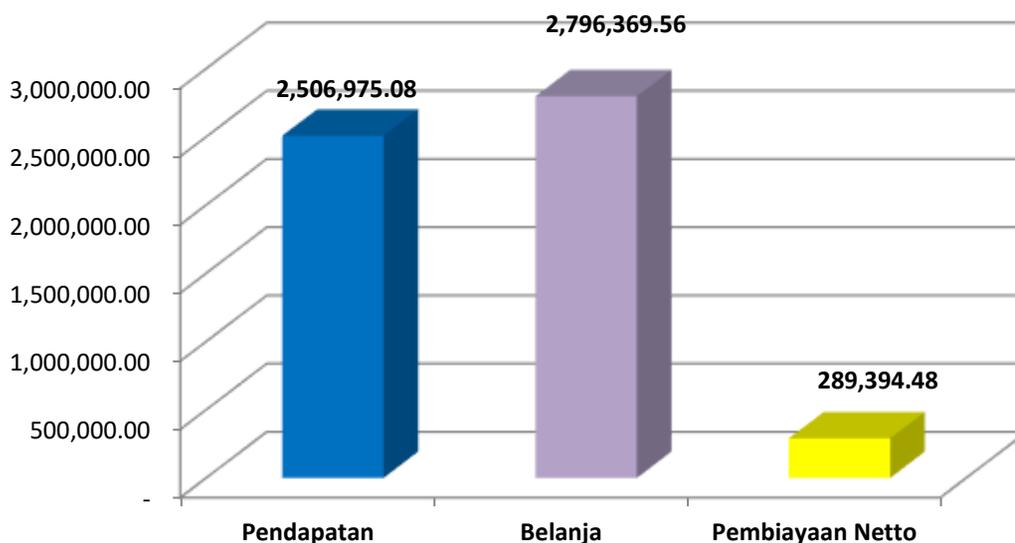
Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**

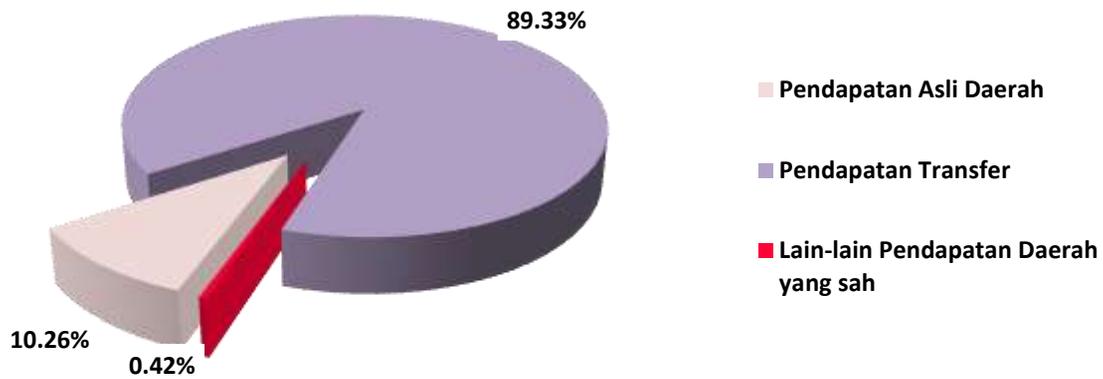


### I. PENDAPATAN

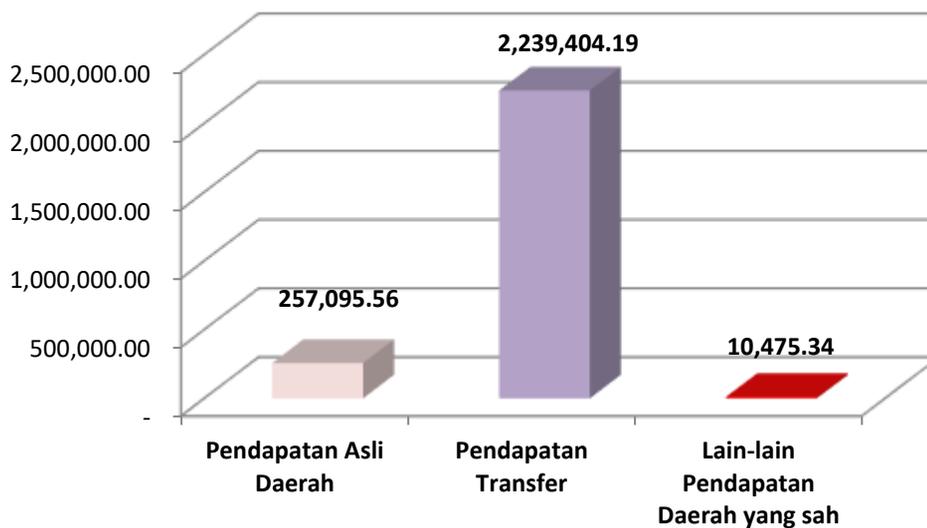
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.506.975.081.086 yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 257.095.557.601
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.239.404.187.485
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 10.475.336.000</u>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 2.506.975.081.086</b>

**Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)**

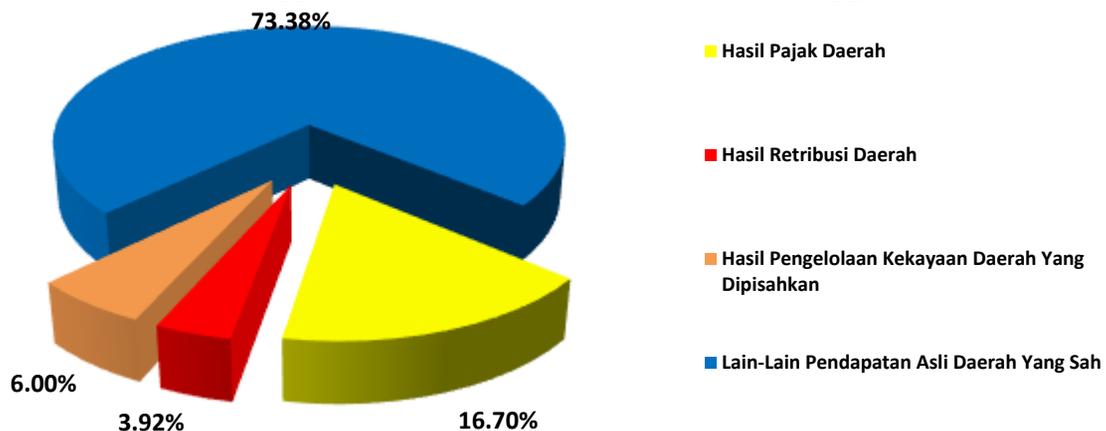


**A. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

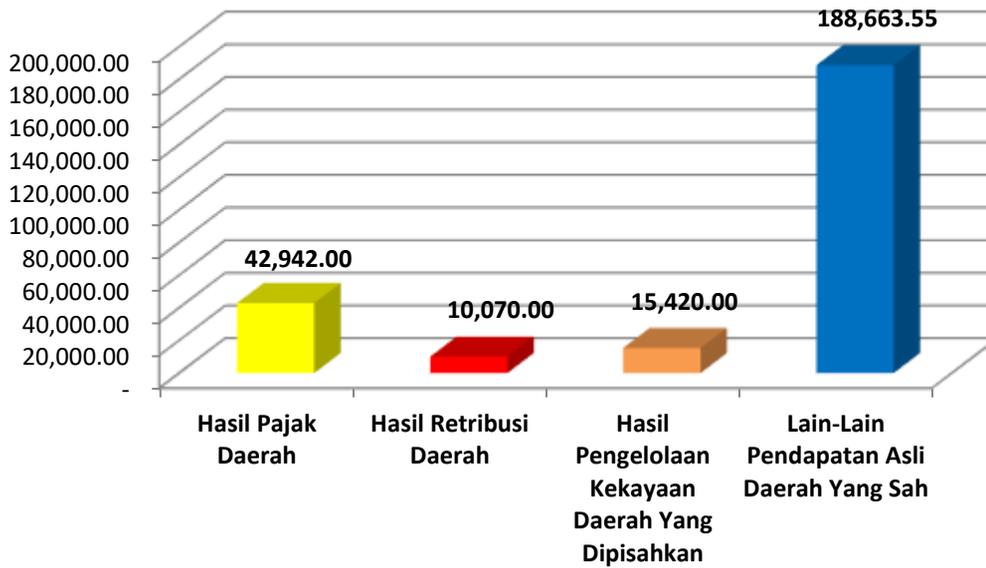
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 257.095.557.601, terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	42.942.000.000
2. Retribusi Daerah	Rp.	10.070.004.579
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	15.420.000.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	<u>188.663.553.022</u>
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.	257.095.557.601

**Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)**

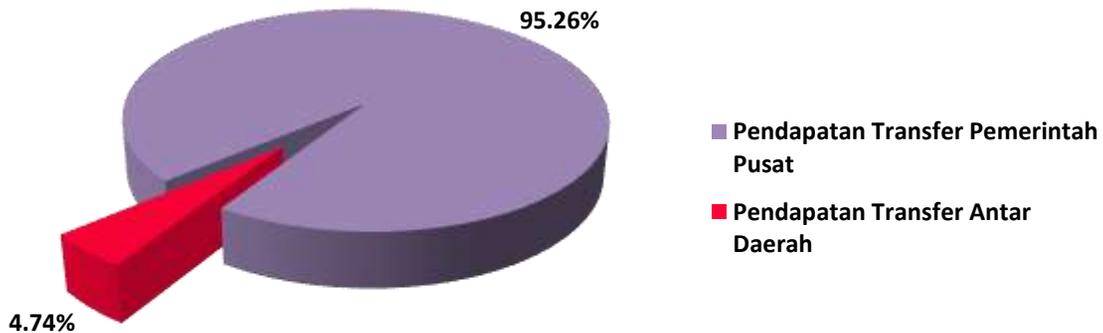


## B. PENDAPATAN TRANSFER

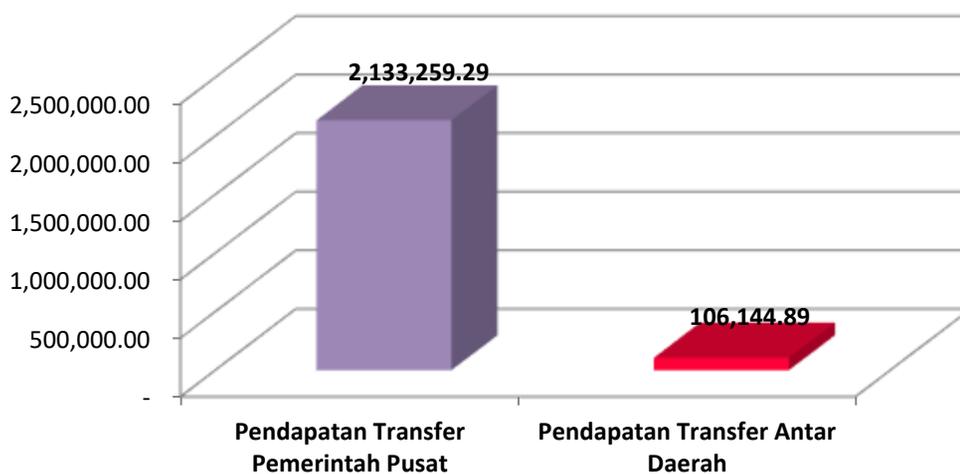
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 2.239.404.187.485 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.133.259.292.838
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	106.144.894.647
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.239.404.187.485

**Gambar 4.a. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 4.b. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)**

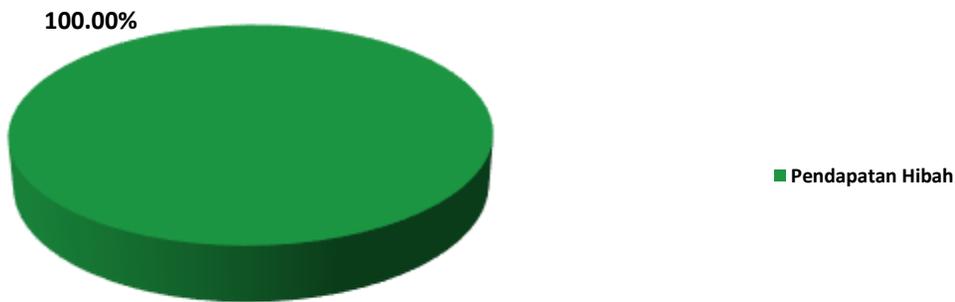


### C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

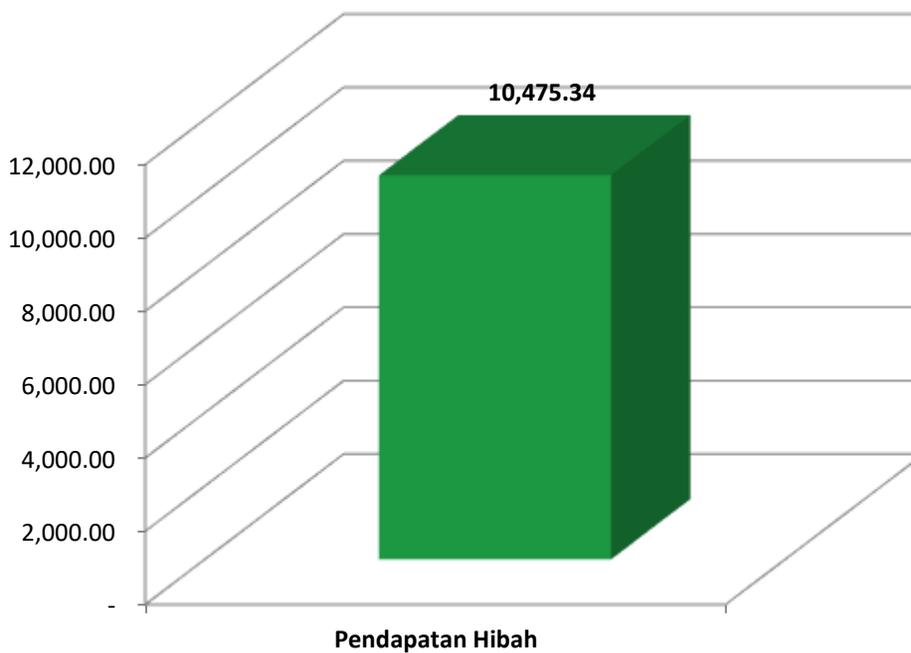
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.10.475.336.000 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp. 10.475.336.000
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 10.475.336.000

**Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ( Dalam jutaan Rupiah)**

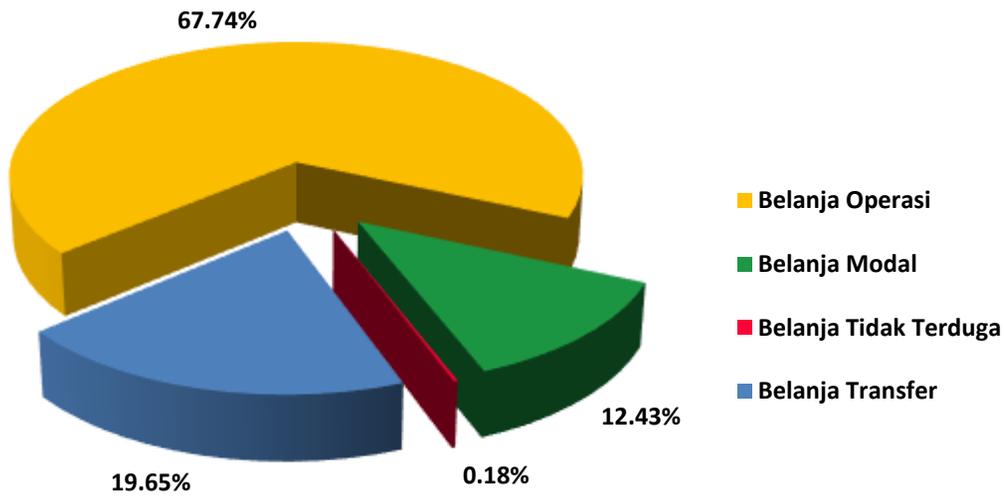


### II. BELANJA

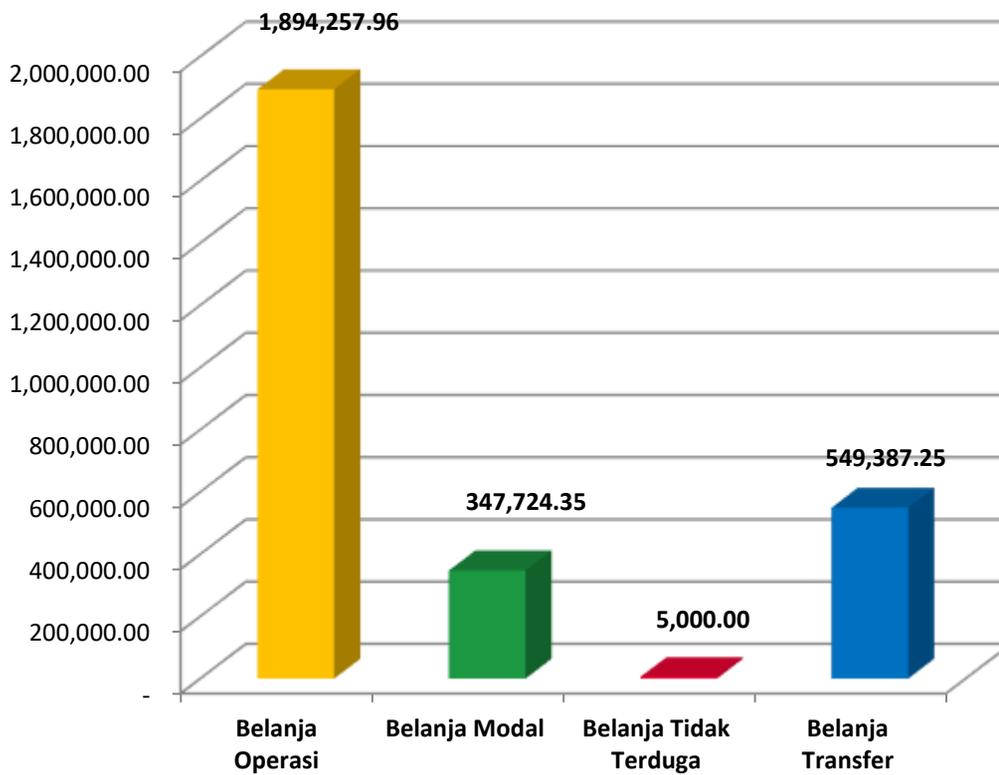
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 menargetkan Belanja sebesar Rp.2.796.369.556.994 yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp. 1.894.257.957.847
b. Belanja Modal	Rp. 347.724.347.717
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp. 549.387.251.430
Total Belanja	Rp. 2.796.369.556.994

**Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**

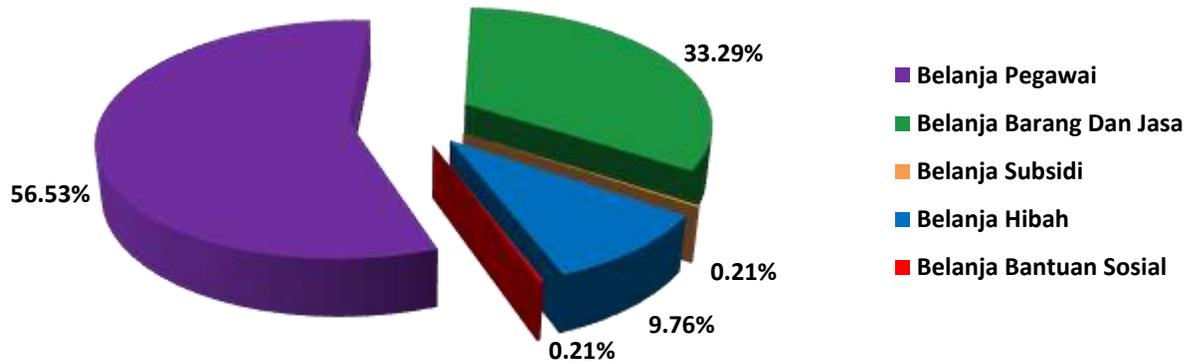


**A. BELANJA OPERASI**

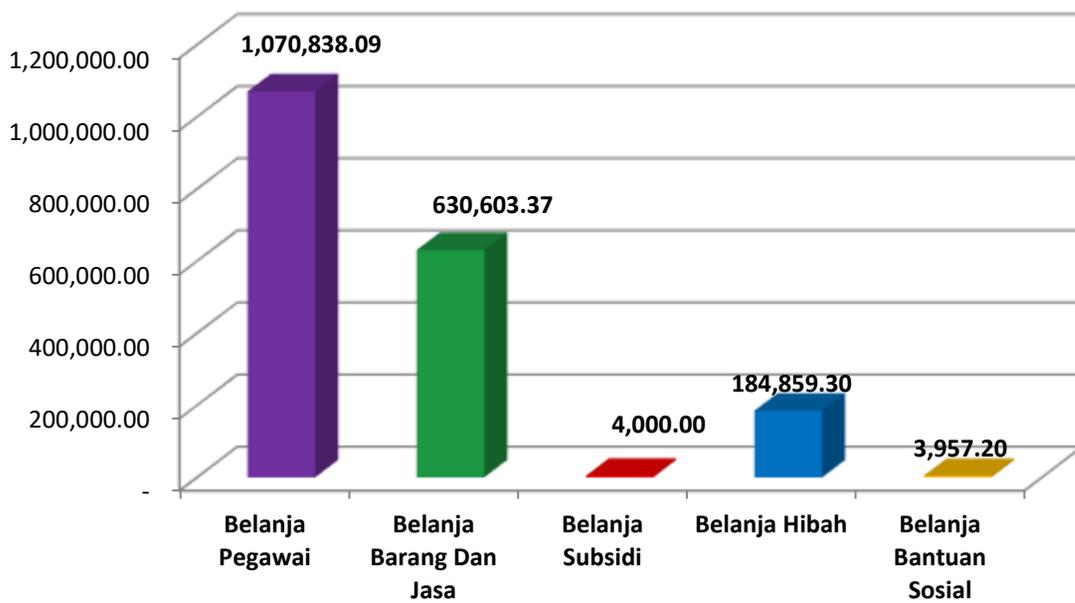
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.894.257.957.847 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.070.838.086.835
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 630.603.371.237
3. Belanja Subsidi	Rp. 4.000.000.000
4. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 184.859.295.775
5. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 3.957.204.000</u>
Total Belanja Operasi	Rp. 1.894.257.957.847

**Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**

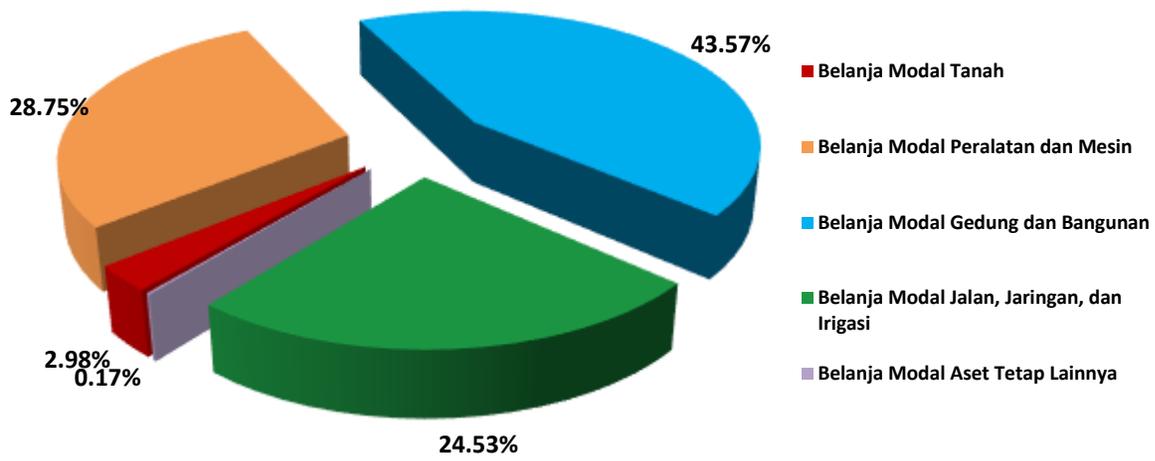


**B. BELANJA MODAL**

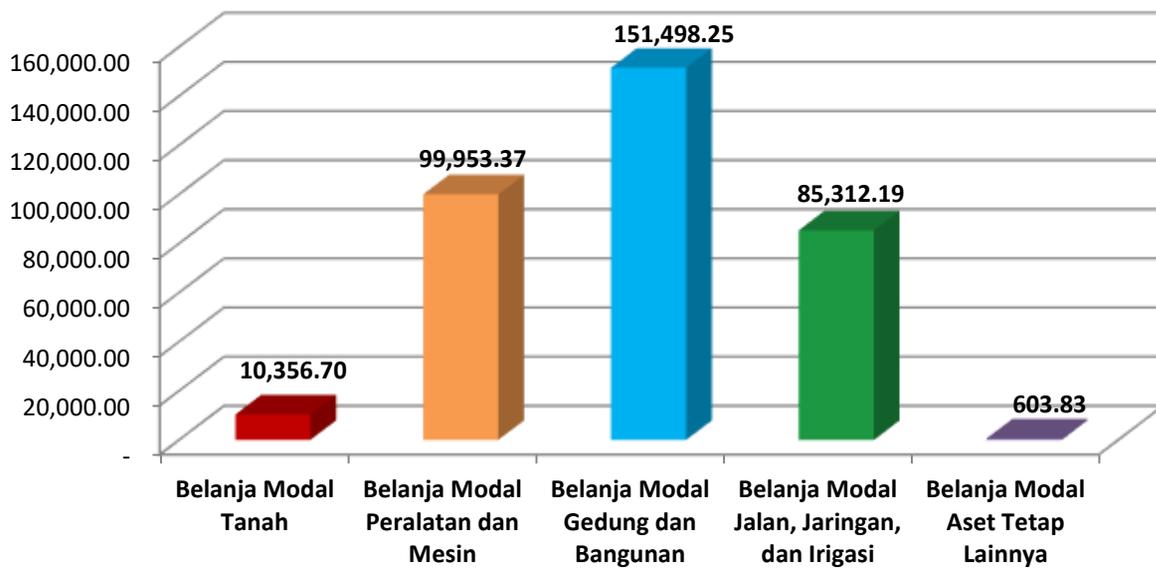
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.347.724.347.717 terdiri dari :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Belanja Modal Tanah                        | Rp. 10.356.703.000 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | Rp. 99.953.371.836 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | Rp.151.498.251.607 |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 85.312.193.274 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | Rp. 603.828.000    |
| Total Belanja Modal                           | Rp.347.724.347.717 |

**Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024**



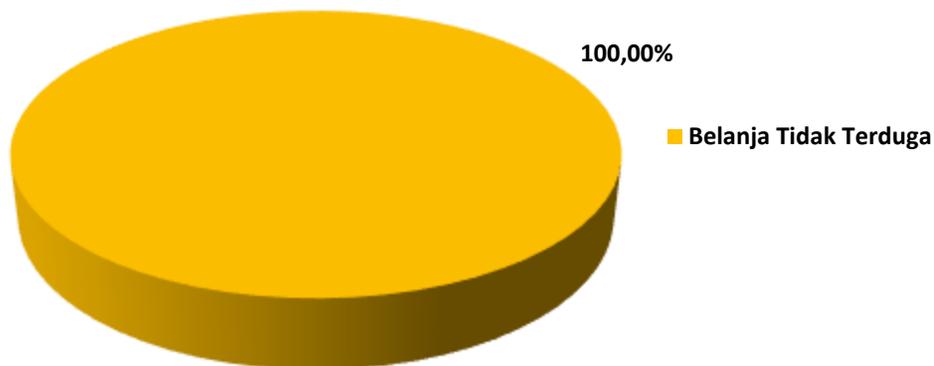
**Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**



**C. BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,-

**Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)**

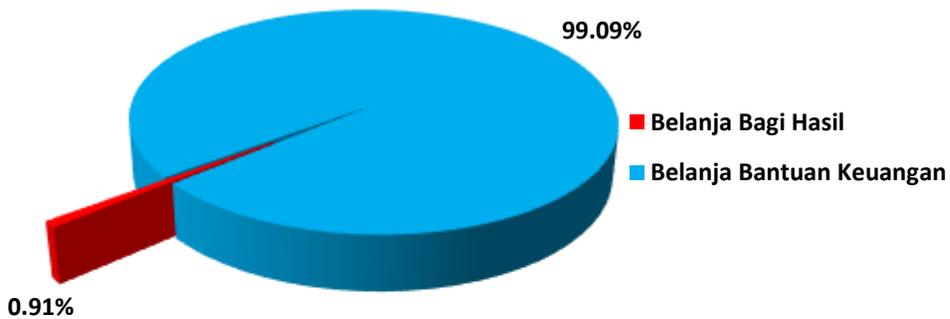


**D. BELANJA TRANSFER**

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.549.387.251.430 terdiri dari :

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Belanja Bagi Hasil       | Rp. 5.000.000.000          |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | <u>Rp. 544.387.251.430</u> |
| Total Belanja Transfer      | Rp. 549.387.251.430        |

**Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)**

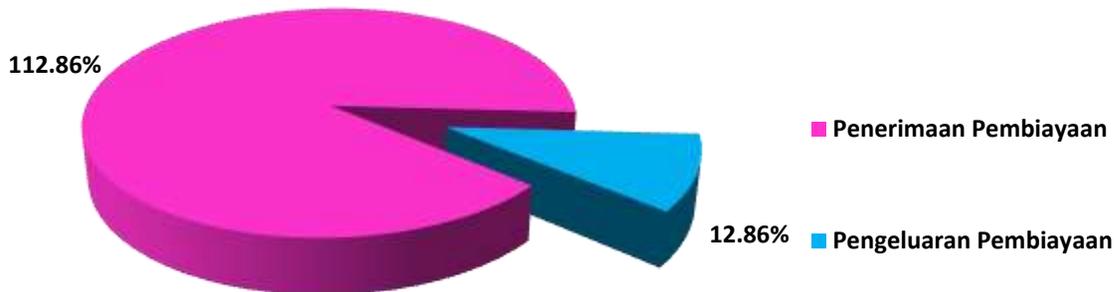


### III. PEMBIAYAAN

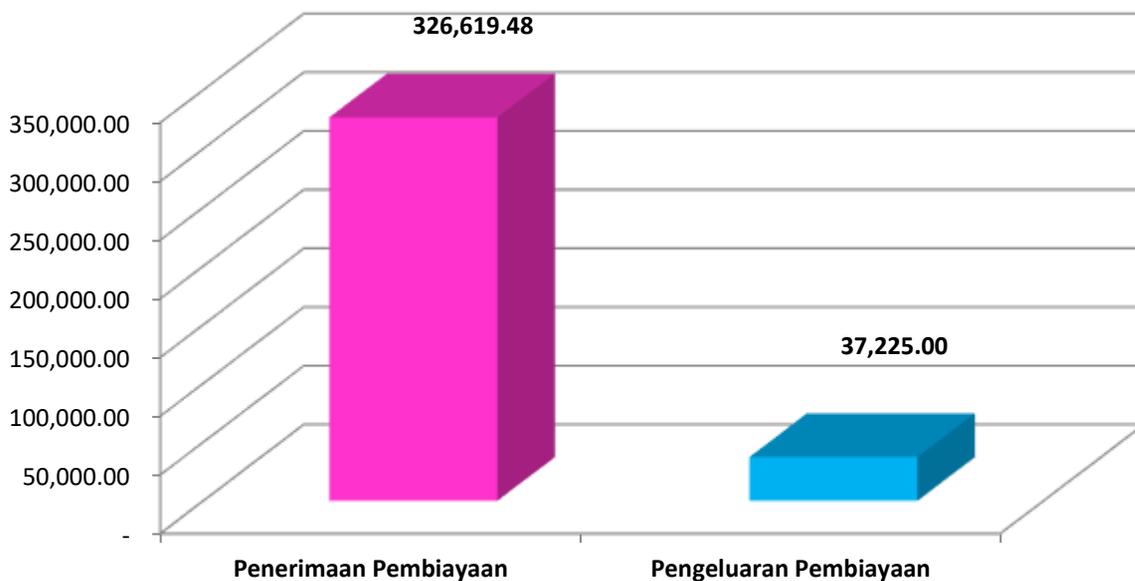
Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh *Defisit* sebesar Rp.289.394.475.908 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	326.619.475.908
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>37.225.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	289.394.475.908

**Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**

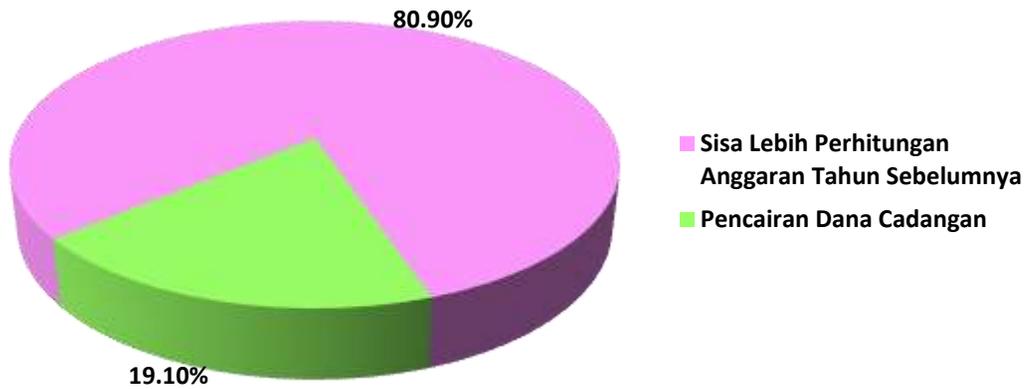


#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

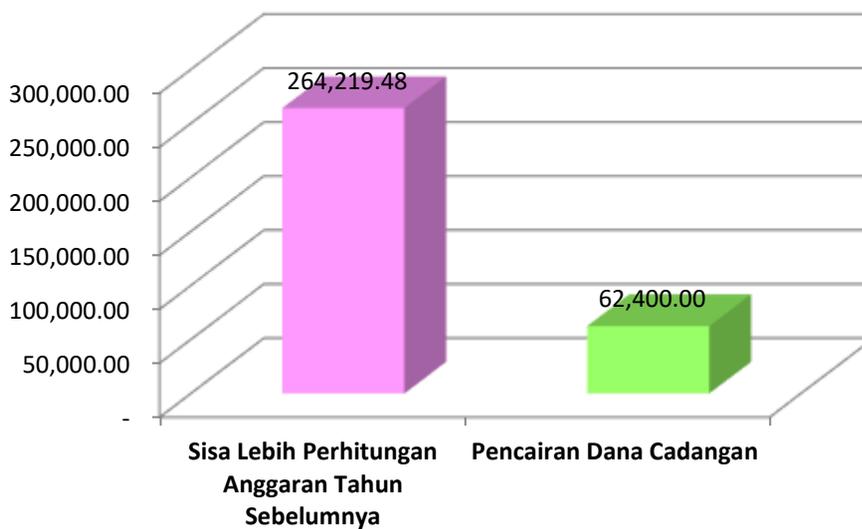
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.326.619.475.908 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	264.219.475.908
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	<u>62.400.000.000</u>
	Rp.	326.619.475.908

**Gambar 13.a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 11.b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Dalam jutaan Rupiah)**

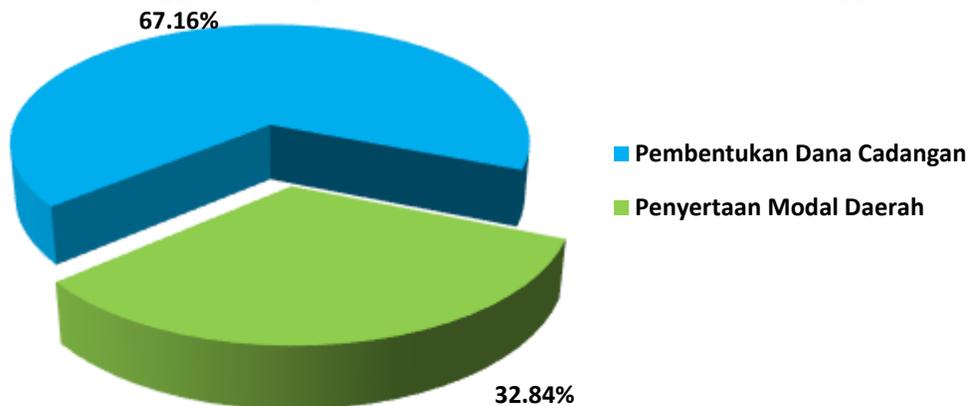


**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

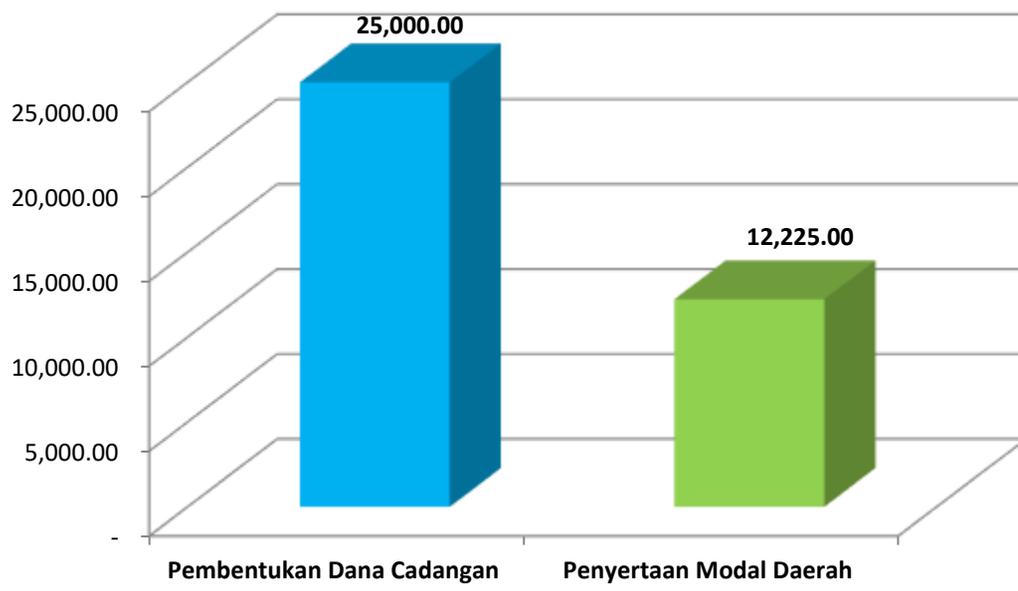
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.37.225.000.000 berupa :

1. Pembentukan Dana Cadangan Rp.25.000.000.000
  2. Penyertaan Modal Daerah Rp.12.225.000.000
- Rp.37.225.000.000

**Gambar 13.a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 11.b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)**



**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD sebagai berikut :

**1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 787.510.564.268,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

**1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 528.300.101.570,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 205.738.190.119,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 3.149.244.506,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

**1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 19.296.695.401,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran.

### **1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 22.179.079.997,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

## **2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.333.942.005,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

### **2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 845.128.050,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

### **2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 848.562.850,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Keamanan Pangan.

### **2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 12.289.855.700,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

### **2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 21.474.705.847,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

## **2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.180.955.771,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

## **2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 15.081.022.083,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

## **2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.829.561.647,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

## **2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 42.872.499.715,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;

## **2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 22.594.668.925,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

## **2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 14.361.806.784,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

#### **2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 6.130.692.414,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

#### **2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 12.004.831.735,00** dengan Program Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

#### **2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 79.555.590,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

#### **2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 67.706.650,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

#### **2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 9.366.545.113,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

#### **2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 5.024.801.296,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

#### **2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 179.362.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

### **3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

#### **3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 7.565.679.369,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

### **3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 1.722.352.382,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

### **3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 97.903.396.933,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

### **3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 1.320.000.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

### **3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 4.452.527.622,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

## **4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **4.1. SEKRETARIAT DAERAH**

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 50.775.375.596,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

### **4.2. SEKRETARIAT DPRD**

Anggaran Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 64.861.376.095,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

## **5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **5.1. PERENCANAAN**

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 9.237.256.267,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 5.2. KEUANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 618.323.052.198,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## 5.3. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 11.627.963.431,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

## 5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 605.768.700,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## 5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 3.735.072.063,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

## 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 15.460.925.533,00** dengan Program Prioritas Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

## 7. UNSUR KEWILAYAHAN

### 7.1. KECAMATAN

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 71.102.079.806,00** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### 7.2. KECAMATAN ADMINISTRASI

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 1.241.511.905,00** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

## **8. PEMERINTAHAN UMUM**

### **8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 75.695.139.058,00** dengan Program Prioritas Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>317,843,223,842</b>	<b>1,248,330,652,019</b>			<b>1,566,173,875,861</b>
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	80,773,534,195	706,737,030,073			787,510,564,268
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	90,013,426,534	438,286,675,036			528,300,101,570
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	145,478,850,296	60,259,339,823			205,738,190,119
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		3,149,244,506			3,149,244,506
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1,481,649,955	17,815,045,446			19,296,695,401
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	95,762,862	22,083,317,135			22,179,079,997
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>22,464,514,352</b>	<b>172,101,689,823</b>			<b>194,566,204,175</b>
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	46,500	10,333,895,505			10,333,942,005
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		845,128,050			845,128,050
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		848,562,850			848,562,850
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10,356,703,000	1,933,152,700			12,289,855,700
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	810,490,785	20,664,215,062			21,474,705,847
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	730,811,035	9,450,144,736			10,180,955,771
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37,783,500	15,043,238,583			15,081,022,083
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		10,829,561,647			10,829,561,647
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4,673,947,312	38,198,552,403			42,872,499,715
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	4,851,490,402	17,743,178,523			22,594,668,925
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	55,973,155	14,305,833,629			14,361,806,784
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	69,341,145	6,061,351,269			6,130,692,414
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	347,060,102	11,657,771,633			12,004,831,735
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		79,555,590			79,555,590
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		67,706,650			67,706,650
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	229,141,416	9,137,403,697			9,366,545,113
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	301,726,000	4,723,075,296			5,024,801,296
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		179,362,000			179,362,000
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>3,620,615,937</b>	<b>109,343,340,369</b>			<b>112,963,956,306</b>
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	514,353,297	7,051,326,072			7,565,679,369

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		1,722,352,382			1,722,352,382
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	393,681,340	97,509,715,593			97,903,396,933
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	400,000,000	920,000,000			1,320,000,000
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,312,581,300	2,139,946,322			4,452,527,622
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>831,759,937</b>	<b>114,804,991,754</b>			<b>115,636,751,691</b>
4.01 Sekretariat Daerah	505,664,248	50,269,711,348			50,775,375,596
4.02 Sekretariat DPRD	326,095,689	64,535,280,406			64,861,376,095
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>490,469,076</b>	<b>88,651,392,153</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>549,387,251,430</b>	<b>643,529,112,659</b>
5.01 Perencanaan	102,594,550	9,134,661,717			9,237,256,267
5.02 Keuangan	182,146,000	63,753,654,768	5,000,000,000	549,387,251,430	618,323,052,198
5.03 Kepegawaian	106,456,074	11,521,507,357			11,627,963,431
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan		605,768,700			605,768,700
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	99,272,452	3,635,799,611			3,735,072,063
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>448,126,980</b>	<b>15,012,798,553</b>			<b>15,460,925,533</b>
6.01 Inspektorat Daerah	448,126,980	15,012,798,553			15,460,925,533
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>2,013,994,359</b>	<b>70,329,597,352</b>			<b>72,343,591,711</b>
7.01 Kecamatan	2,013,994,359	69,088,085,447			71,102,079,806
7.01 Kecamatan Administrasi		1,241,511,905			1,241,511,905
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11,643,234</b>	<b>75,683,495,824</b>			<b>75,695,139,058</b>
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	11,643,234	75,683,495,824			75,695,139,058
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>347,724,347,717</b>	<b>1,894,257,957,847</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>549,387,251,430</b>	<b>2,796,369,556,994</b>